

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pendidikan Kejuruan

a. Pengertian Pendidikan Kejuruan

Undang – undang nomor 20 tahun 2003 pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa jenjang pendidikan tingkat menengah terdapat dua macam model pendidikan, yaitu pendidikan umum (*general education*) dan pendidikan kejuruan (*vocasional education*). Pada undang – undang tersebut disebutkan pendidikan kejuruan merupakan jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu sedangkan pendidikan vokasi adalah pendidikan kejuruan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program profesi atau diploma.

Beberapa ahli mengemukakan pengertian dari pendidikan seperti yang telah dikutip Hermin (2018: 10) yaitu: (a). Wenrich & Wenrich menyatakan pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang untuk mampu bekerja dan meniti karier dalam bidang pekerjaannya. (b). Clarke & Winch mendefinisikan pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang menyiapkan anak-anak muda dan remaja untuk memasuki lapangan kerja, pendidikan kejuruan adalah suatu proses yang pembelajarannya berkaitan dengan masalah teknik dan praktik. Definisi tersebut mempertegas bahwa pendidikan kejuruan memiliki peran untuk membekali peserta didik agar

memiliki pengetahuan, keahlian dan sikap sehingga mampu dan siap bekerja pada suatu kelompok perkerjaan atau satu bidang pekerjaan tertentu.

b. Tujuan Pendidikan Kejuruan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tujuan pendidikan kejuruan adalah untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya, mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih.

Kriteria pendidikan kejuruan memiliki orientasi pada kinerja individu dalam dunia kerja, dalam artian lulusan pendidikan kejuruan harus mempunyai kesiapan untuk terjun dalam dunia industri. oleh sebab itu idealnya fasilitas pembelajaran di institusi pendidikan kejuruan harus mendukung pelaksanaan kompetensi-kompetensi yang ada dalam kurikulum sehingga target pengetahuan dan keterampilan yang disyaratkan kurikulum dapat terlaksana dalam pembelajaran praktik.

Sesuai dengan tujuan pendidikan kejuruan di atas, bahwa peran dunia usaha dan dunia industri akan sangat penting dalam mengembangkan

keterampilan siswa dengan kegiatan pembelajaran ataupun fasilitas-fasilitas yang relevan terhadap industri atau dunia kerja. Mutu produk pendidikan sangat erat kaitannya dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: kurikulum, tenaga kependidikan, proses pembelajaran, sarana-prasarana, alat dan bahan, manajemen sekolah, dll harus disesuaikan dengan perkembangan zaman di dunia usaha/dunia industri agar lulusan pendidikan kejuruan siap untuk memasuki dunia kerja dan mampu menyesuaikan dengan masyarakat/dunia kerja.

2. Sekolah Menengah Kejuruan

Penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan didasarkan atas ketentuan yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional Bab IV pasal 11 ayat (1) dan (3) yang berbunyi: Jenis pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Sekolah menengah kejuruan berdasarkan tingkatan pendidikan setara dengan sekolah menengah atas, akan tetapi keduanya mempunyai tujuan yang berbeda.

Menurut Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2010 pasal 1 ayat 15 menyatakan: Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. Sekolah menengah kejuruan merupakan

bentuk satuan pendidikan formal yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar baik teori maupun praktik yang berlangsung di sekolah maupun industri yang diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas untuk memasuki lapangan kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

Menurut Utomo (2009: 9) Sekolah Menengah Kejuruan memiliki tujuan yaitu untuk mempersiapkan, memilih dan menempatkan calon tenaga kerja sesuai dengan tanda-tanda pasar kerja. Mengacu pada UU No 20 Tahun 2003 Pasal 3, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dibidang tertentu. Lulusan SMK diharapkan mampu: a) bekerja baik secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri. Berperan sebagai tenaga kerja terampil tingkat menengah dalam dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja terampil tingkat menengah dalam bidang keahliannya, b) memilih karir berkompetisi mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahliannya.

Program pendidikan di SMK sesuai dengan spektrum keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008, di kelompokkan ke dalam enam bidang studi keahlian yaitu: (1) teknologi dan rekayasa; (2) teknologi informasi dan komunikasi; (3) kesehatan; (4) seni, kerajinan, dan pariwisata; (5) agribisnis dan agroteknologi; dan (6) bisnis dan manajemen. Masing-masing bidang studi keahlian memiliki program studi

keahlian, dan masing-masing program studi keahlian memiliki kompetensi keahlian.

Berdasarkan pendapat dari berbagai ahli dapat disimpulkan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan merupakan satuan pendidikan formal tingkat menengah dengan berbagai program keahlian dengan melaksanakan kegiatan belajar mengajar teori maupun praktik sehingga diharapkan lulusannya mampu bekerja secara mandiri ataupun mengisi lowongan yang ada sesuai dengan tuntutan dunia kerja serta dapat mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Dunia Usaha/Dunia Industri (Du/Di)

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diberi amanah oleh undang - undang untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja dan menjadi tenaga kerja yang produktif. Lulusan SMK idealnya merupakan tenaga kerja yang siap pakai, dalam arti langsung bisa bekerja di dunia usaha dan industri.

Permasalahan SMK saat ini pada umumnya terkait dengan keterbatasan peralatan, masih rendahnya biaya praktik, dan lingkungan belajar yang tidak serupa dengan dunia kerja. Kondisi ini bisa menyebabkan ketidaksiapan lulusan dalam memasuki dunia kerja. Ketidaksiapan lulusan SMK dalam melakukan pekerjaan yang ada di dunia kerja menjadikan hal dilematis terhadap industri pemakai, karena industri harus menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan di dalam industri untuk menyiapkan tenaga kerjanya. Dengan demikian pihak industri harus mengalokasikan biaya ekstra di luar biaya produksi. Sebenarnya

pihak industri dan pihak sekolah memiliki keterbatasan masing-masing dalam membentuk dan mendapatkan tenaga kerja siap pakai. Pihak sekolah memiliki keterbatasan dalam pembiayaan dan penyediaan lingkungan belajar, sementara pihak industri memiliki keterbatasan sumber daya pendidikan untuk membentuk tenaga kerja yang dibutuhkan. Oleh karena itu untuk mendapatkan lulusan SMK yang siap kerja maka semestinya dilakukan kerjasama agar nantinya saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pengertian industri menurut UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misal mesin.

Wahyu (2008: 215) mengungkapkan bahwa dunia usaha atau dunia industri (Du/Di) merupakan lapangan kerja bagi masyarakat yang sudah mempunyai keterampilan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. kebutuhan perusahaan. Dalam konteks pendidikan hal ini mengandung bahwa Du/Di dapat menjadi nara sumber, tempat belajar, sumber belajar, dan materi/substansi ajar.

Sedangkan dunia kerja pada Du/Di adalah gambaran tentang beberapa jenis dan proporsi pekerjaan yang ada seperti dalam bidang pertanian, usaha dan perkantoran, rekayasa, kesehatan, militer kemasyarakatan, kerumahtanggaan, dan seni budaya. Menurut Yuliani (2013:18) Du/Di adalah lingkungan atau

lapangan kegiatan seseorang untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu yang menghasilkan alat pemenuhan kebutuhan yang ada, seperti barang atau jasa, dan memperoleh bayaran atau upah. Pendapat tersebut mengatakan bahwa dunia kerja adalah suatu lingkungan atau lapangan kerja dengan suatu fungsi yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu pemenuhan kebutuhan.

Menurut Depdiknas (2007) dunia usaha dan industri merupakan lapangan kerja bagi masyarakat yang sudah mempunyai keterampilan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Atau dapat juga diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dunia kerja, atau yang bisa juga disebut dunia usaha atau dunia industri (Du/Di) adalah suatu tempat atau lapangan kerja yang digunakan sebagai alat atau sarana penyaluran tenaga kerja dan sarana untuk mengimplementasikan ilmu serta kemampuan yang dilakukan dengan cara melakukan suatu pekerjaan untuk menghasilkan alat pemenuhan kebutuhan yang ada dan mendapatkan bayaran atau upah. Kerjasama sekolah dengan Du/Di diartikan sebagai jalinan untuk berhubungan secara kelembagaan yang saling menguntungkan antara pihak sekolah dengan pihak Du/Di dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan dan latihan.

4. *Link and Match*

Peningkatan sumber daya manusia selalu diupayakan oleh pemerintah melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal dengan mengajak peran

serta masyarakat, pengusaha swasta, untuk bertanggungjawab dalam rangka mencedaskan kehidupan bangsa. Guna meningkatkan kualitas pelajar Sekolah Mengah Kejuruan (SMK) diperlukan wahana yang mampu memberikan fasilitas/ sarana kepada peserta didik untuk melakukan kerja praktik.

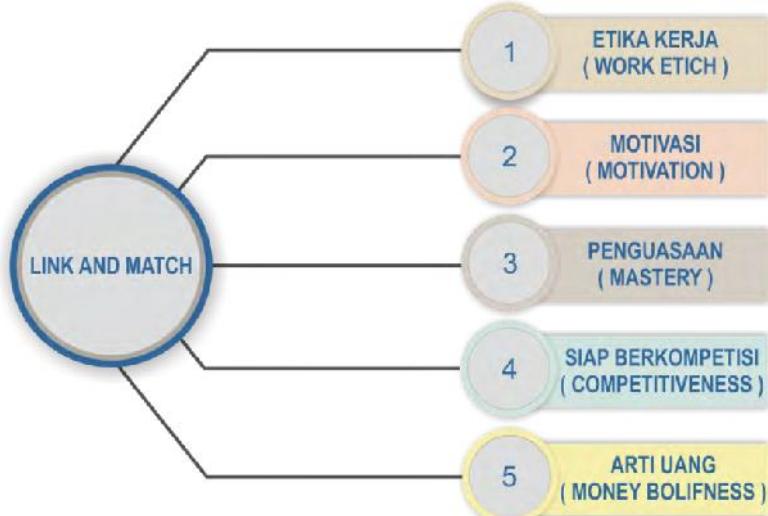
Salah satu program peningkatan kualitas peserta didik SMK yang dicetuskan oleh mantan Mendiknas Prof. Dr Wardiman adalah melalui *link and match*. Program *link and match* merupakan program yang melibatkan pelajar SMK untuk mempraktikan ilmu yang telah diperoleh selama di kelas dengan kegiatan industri/pabrik maupun jasa, pada instansi pemerintah/perusahaan swasta juga membekali keterampilan, menambah pengalaman peserta didik sehingga saat lulus sekolah sudah siap untuk masuk dunia kerja. Inti dari konsep *link and match* yaitu a) adanya keterkaitan antara program pendidikan yang diberikan di sekolah dengan kebutuhan masyarakat secara luas, dan b) adanya kesesuaian atau kecocokan antara program dan produk pendidikan di sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini semakin sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja (*link and match*), jika program-program keahlian yang diselenggarakan di SMK melibatkan industri dalam menetapkan standar keahlian, pengembangan kurikulum, dan kebijaksanaan pengelolaan sistem pendidikan, serta penyesuaian karakteristik daerah yang memerlukan pendidikan kejuruan. Karena itu, sekolah harus mengajarkan bidang keahlian (kompetensi) yang dibutuhkan dunia kerja dalam pembelajaran. Perusahaan juga harus membuka peluang bagi peserta didik yang ingin bekerja (magang) di perusahaan tersebut.

Sementara itu pemerintah harus serius dan tidak semata memandang program *link and match* sebagai proyek belaka.

Adapun pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan *Link and Match* menurut Husaini Usman (2006: 56-59) yaitu pendekatan sosial dan pendekatan ketenagakerjaan. Pendekatan sosial merupakan pendekatan yang didasarkan atas keperluan masyarakat yang mana pendekatan ini menitikberatkan pada tujuan pendidikan dan pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan. Sementara itu, pendekatan ketenagakerjaan merupakan pendekatan yang mengutamakan kepada keterkaitan lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan terhadap tenaga kerja pada berbagai sektor pembangunan dengan tujuan yang akan dicapai adalah bahwa pendidikan itu diperlukan untuk membantu lulusan memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik sehingga tingkat kehidupannya dapat diperbaiki. Tujuan dari pendekatan ini untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, disisi lain tuntutan dunia kerja berubah-ubah sesuai dengan cepatnya perubahan zaman.

Dalam tujuan Revitalisasi SMK, Menteri pendidikan dan kebudayaan juga menginstruksikan untuk menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*). “*Link*” dan “*match*” mengisyaratkan agar para lulusan mempunyai wawasan atau sikap kompetitif, seperti etika kerja , pencapaian motivasi, penguasaan, sikap berkompetisi, memahami arti uang, dan sikap menabung. “*Link*” dan “*match*” memerlukan perubahan kerangka pikir dari seluruh pelaksana pendidikan baik

institusi pendidikan maupun staf pengajar harus pro aktif mengembangkan “link” dan “match” dengan dunia kerja.



Gambar 1. Skema Link and Match Revitalisasi SMK

(Sumber: Strategi Implementasi Revitalisasi SMK, 2017: 13)

Dalam perwujudan revitalisasi sekolah menengah pertama, Direktorat Pembinaan SMK telah menetapkan lima area revitalisasi yang terdiri atas kurikulum, guru dan tenaga kependidikan, kerjasama dengan Dunia Usaha/Industri, sertifikasi dan akreditasi, serta sarpras dan kelembagaan. Masing-masing dari lima area revitalisasi tersebut perlu diimplementasikan dengan langkah nyata demi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul di setiap bidang. Perwujudan langkah nyata tersebut dilakukan dengan sepuluh langkah revitalisasi SMK yang dijelaskan seperti pada gambar berikut.



Gambar 2. Perwujudan Revitalisasi dalam 10 Langkah Revitalisasi SMK

(Sumber: Strategi Implementasi Revitalisasi SMK, 2017: 14)

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa program link and match merupakan suatu program yang melibatkan peserta didik SMK untuk mempraktikkan ilmu yang telah diperoleh pada kegiatan industri/pabrik di instansi pemerintah/perusahaan swasta untuk membekali keterampilan, menambah pengalaman peserta didik agar siap untuk masuk dunia kerja. *Link and Match* juga mendukung program pemerintah dalam melakukan revitalisasi SMK yang bertujuan menyiapkan lulusan SMK yang siap terhadap perubahan dunia untuk menjadi lulusan yang dapat bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha hal ini dikarenakan dunia industri juga memerlukan sumber daya yang berkualitas dan profesional dibidangnya untuk mengoperasikan peralatan industri berteknologi canggih.

5. Pola Kerjasama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:704) kerjasama merupakan sesuatu yang ditangani oleh beberapa pihak. Kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pelaksanaan kerjasama akan membentuk kemitraan kerjasama antar kedua lembaga.

Kemitraan adalah kesepakatan antar sektor dimana individu, kelompok atau lembaga melaksanakan kegiatan tertentu, bersama-sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerjasama. Menurut Thoby Mutis (1992), kemitraan adalah suatu strategi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersama maupun keuntungan bersama sesuai prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi sesuai kesepakatan yang muncul. Keinginan dua pihak menjalin suatu kerja sama pada prinsipnya didasari atas keinginan masing-masing pihak agar dapat memenuhi kebutuhan usaha satu sama lain.

Menurut Lydia dalam perjanjian kemitraan sebagai pola kerjasama penerapan CSR, kemitraan kerjasama memiliki tiga bentuk, antara lain:

- 1) Pola kerjasama Kontra Produktif : pola ini terjadi apabila perusahaan hanya mencari profit sebesar-besarnya tanpa memperhatikan *triple bottom lines* (evaluasi kinerja yang dilakukan melalui kombinasi aspek pengungkapan ekonomi, lingkungan, dan sosial). Dengan adanya pola kerjasama ini, selain menimbulkan keuntungan yang berat sebelah, akan juga menimbulkan

ketidakseimbangan dan merugikan salah satu pihak serta menimbulkan ketidakpercayaan sesama lembaga.

- 2) Pola kerjasama Semi Produktif : Pola ini lebih mengedepankan *Public Relation* atau meningkatkan kepercayaan satu sama lain tetapi kerjasama ini masih belum strategis dan masih mengedepankan kepentingan keuntungan, bukan kepentingan bersama.
- 3) Pola kerjasama produktif : Pola ini menempatkan mitra sebagai subyek dalam paradigma *common interest*. Prinsip simbiosis mutualisme sangat dijunjung tinggi. Dunia industri memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial dalam bekerjasama dan akan *transfer knowledge* baik itu dalam bentuk pemberian modal ataupun pendidikan, sehingga tidak hanya meningkatkan kualitas masyarakat namun juga memberikan nama yang baik kepada *brand* industri tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, pola kemitraan dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan kerjasama memiliki tiga pola yaitu, pola kerjasama kontra produktif, pola kerjasama semi produktif dan pola kerjasama produktif.

Dalam bidang pembelajaran, kerjasama yang dilakukan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Du/Di) adalah sebuah strategi pembelajaran dan bisnis yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Kerjasama dilakukan selain karena tuntutan kurikulum juga sebagai upaya pengembangan keterampilan peserta

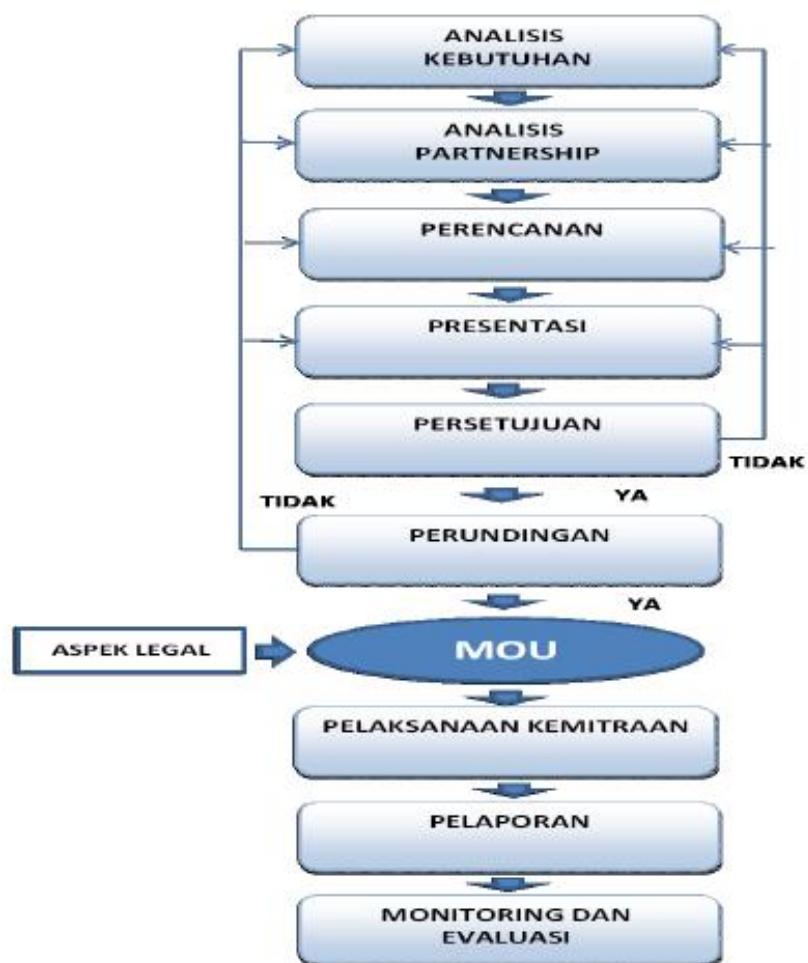
didik SMK dalam bentuk kerja nyata industri yang diharapkan juga dapat memberikan keuntungan bagi industri untuk memanfaatkan mereka sebagai tenaga kerja bantu pada level operasional dan juga industry. Pola kerjasama bisa dilakukan secara berkesinambungan dan secara teknis sekolah yang harus berinisiatif untuk menginformasikan kepihak industri mengenai jadwal dan waktu, sehingga antara industry dan sekolah secara bersama sama membuat komitmen dengan industri MoU. Untuk memberikan kepercayaan kepada Industri pola ini akan dibuat secara detail dan terinci dalam *Guide Line* pelatihan, dan akan dilindungi dengan Industri MoU yang lebih jelas. Proses pelaksanaan akan ditangani secara professional oleh unit pelaksana teknis produksi dan training di bawah bidang kerjasama dan pelayanan industri disetiap SMK (Isbianti, 2009:41-45).

6. Pelaksanaan Kerjasama

a. Pelaksanaan Kerjasama SMK dengan Dunia usaha/Dunia Industri

Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (2015: 2) menjelaskan bahwa pelaksanaan program kerjasama sekolah dengan pihak eksternal terdiri dari: 1) analisa kebutuhan program kemitraan sekolah dengan pihak eksternal; 2) analisa partner institusi/lembaga/masyarakat pada kemitraan sekolah sebagai pihak eksternal; 3) penyusunan proposal kemitraan sekolah dengan pihak eksternal; 4) penyusunan MoU kemitraan sekolah dengan pihak eksternal; 5) Penentuan aspek monitoring dan evaluasi kemitraan sekolah dengan pihak eksternal; 6) Penyusunan program tindak lanjut kemitraan sekolah dengan pihak eksternal. Tahapan pelaksanaan kerjasama antar lembaga tersebut pada dasarnya

terbagi menjadi tiga tahap yakni tahap 1 meliputi proses analisis kebutuhan, analisis partner ship, perencanaan dan presentasi. Tahap 2 meliputi proses persetujuan, perundingan, dan penandatanganan MoU. Tahap 3 meliputi proses pelaksanaan kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi. Berikut ini merupakan bagan alur/tahapan kerjasama antar lembaga SMK dengan Dunia Usaha/Dunia Industri.



Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan Kerjasama Antarlembaga

(Sumber: Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, 2015: 26)

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam mengelola implementasi kurikulum, maka penjelasan tahapan pelaksanaan kerjasama pada gambar di atas adalah sebagai berikut.

1) Tahap 1: Analisis kebutuhan , analisa partnership, perencanaan dan presentasi

Tahap awal kerjasama antar lembaga dimulai dengan analisa kebutuhan ataupun inovasi untuk melakukan kerjasama. Pemetaan dan identifikasi berbagai potensi yang ada dilakukan secara mendalam. Analisa kebutuhan ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek peningkatan akses, pemetaan kemampuan internal dan eksternal, serta peningkatan kualitas pendidikan. Analisa kebutuhan ini perlu dilakukan agar kerjasama yang dilakukan tepat sasaran, membawa keuntungan yang optimal, efisien dan meningkatkan potensi dan produktifitas pihak-pihak yang melakukan kemitraan.

Selanjutnya analisis partnership dilakukan untuk menentukan pihak-pihak yang akan diajak untuk bermitra perlu mempertimbangkan agar dapat dihasilkan strategi dan kerjasama yang benar-benar mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas, terutama bagi tamatan SMK. Dalam analisa partnership ini dapat mulai dilakukan penjajakan dengan tukar menukar informasi dan kesiapan pihak-pihak pelaksana kegiatan. Analisa yang baik akan mempermudah proses perencanaan dan perundingan karena memperkuat strategi pelaksanaan kemitraan.

Perencanaan kemitraan merupakan langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan kemitraan yang berkesinambungan. Perencanaan kemitraan dibuat dengan mengacu kepada prinsip-prinsip kerjasama yaitu: sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan kesejajaran dan kesetaraan. Perencanaan dibuat secara berkesinambungan dan integral yang memasukkan keseluruhan aspek mulai dari dokumentasi yang diperlukan sampai kegiatan monitoring dan evaluasi, dan diakhiri dengan pelaporan kemitraan. Dalam pembuatan rencana kemitraan, ketepatan strategi sangat diperlukan agar tercapainya efektifitas dan efisiensi. Dari kemitraan yang akan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi.

Langkah berikutnya dalam perencanaan adalah menyusun proposal kemitraan. Komponen proposal umumnya menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik kegiatan kerjasama. Contoh kerangka proposal kerjasama, terdiri dari dasar pemikiran, tujuan, target, tempat dan waktu, anggaran, panitia dan penutup. Contoh lain proposal, terdiri dari Pendahuluan, Bab I meliputi rasional, tujuan, ruang lingkup kerjasama, manfaat kerjasama; Bab II. analisa kebutuhan, arah pengembangan, Bab III, program kegiatan, nama kegiatan, jenis kegiatan, tujuan kegiatan, sasaran, jenis kegiatan, deskripsi kegiatan, strategi, evaluasi; Bab IV, penutup. Lampiran-lampiran. Setelah dibuat perencanaan kerjasama, presentasi dilakukan kepada pimpinan dan pihak-pihak yang terkait dengan program kemitraan yang telah direncanakan. Presentasi sebaiknya dipersiapkan dengan matang baik materi, alat-alat pendukung, waktu, maupun cara

penyampaian, agar bagianbagian yang terkait dan para pengambil keputusan dapat memahami tujuan dan keuntungan dari program kerjasama yang ditawarkan. Sebaiknya pada proses presentasi ini dilakukan diskusi dan evaluasi awal atas rencana yang telah dibuat.

2) Tahap 2: Proses persetujuan, perundingan dan penandatanganan MoU

Persetujuan dari atasan dan pihak-pihak yang terkait dengan kerjasama yang akan dilakukan sangat penting karena menjadi pendukung kelanjutan dan kelancaran pelaksanaan rencana kerjasama yang telah dibuat. Persetujuan ini akan lebih baik jika dibuat dalam bentuk ketetapan formal. Perundingan merupakan tahap yang sangat menentukan untuk kelanjutan dari program kemitraan yang telah dibuat. Dalam proses ini kedua belah pihak yang akan bermitra merundingkan segala aspek, ruang lingkup, bentuk kerjasama dan masalah-masalah teknis lainnya untuk dituangkan dalam perjanjian.

3) Tahap 3: Proses pelaksanaan kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan kerjasama sesuai dengan batasan-batasan yang ada dalam MoU yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pelaporan merupakan unsur penting, tidak hanya bagi dokumentasi, tetapi dapat juga memberikan gambaran kepada berbagai pihak mengenai pekerjaan yang dilakukan. Pelaporan juga dapat memberikan masukan untuk perencanaan dan strategi untuk program kemitraan selanjutnya. Pelaporan sebaiknya berisi informasi, perkembangan, analisa dan rekomendasi. Proses pelaporan yang baik akan mendukung tidak hanya proses monitoring dan evaluasi, lebih jauh pelaporan yang baik akan

membantu terciptanya data base yang lengkap yang akan menjadi sumber data bagi kegiatan atau program-program yang lain.

Memorandum of Understanding (MoU) merupakan payung dari kerjasama yang akan dilakukan. MoU harus benar-benar memperhatikan aspek legal. Disarankan untuk semua MoU yang dibuat dikonsultasikan kepada ahli bidang hukum di institusi masing-masing. Naskah kerjasama dalam kemitraan dapat dirumuskan oleh masing-masing pihak yang untuk mencari titik temu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Beberapa hal yang perlu dicermati pada saat membuat MoU adalah: (1) perjanjian kerja sama sesuai dengan hukum yang berlaku serta mengikat kepentingan umum; (2) objek dalam surat kerjasama diterangkan dengan jelas; (3) masing-masing pihak yang akan terikat dengan surat perjanjian kerjasama ini wajib memberikan identitas yang benar dan elas; (4) terdapat kesepakatan kedua belah pihak tanpa dasar paksaan apapun; (5) terdapat latar belakang kesepakatan atau retical; (6) isi perjanjian harus jelas untuk kedua belah pihak, yang dijelaskan/dituangkan dalam pasal-pasal dan ayat-ayat; (7) terdapat juga pembahasan tentang mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak; (8) adanya tanda tangan kedua belah pihak, dan ada saksi-saksi yang juga wajib menandatangani surat perjanjian; (9) terdapat salinan dalam surat perjanjian. MoU antara sekolah dengan DU/DI disesuaikan dengan bidang yang disepakati pelaksanaannya. Kepala Program Keahlian (Kakom) perlu mengetahui butir-butir isi MoU sehingga dapat mengimplementasikan sesuai kebutuhan.

Proses monitoring dan evaluasi sangat bermanfaat bagi penilaian kinerja dan efektifitas. Proses ini memerlukan komitmen untuk dijalankan secara berkesinambungan dari berbagai pihak, karena tanpa itu mekanisme pertukaran informasi tidak akan berjalan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan dalam proses monitoring dan evaluasi terdiri atas kegiatan-kegiatan: 1) pemantauan berkala; 2) evaluasi program; 3) pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi. Kegiatan tim monitoring dan evaluasi adalah: mengumpulkan data dan informasi tentang kemitraan yang dilaksanakan, dengan menggunakan kuesioner yang dibuat oleh tim; menganalisa dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis kemitraan sekaligus membuat data base dalam bentuk software maupun hardware; membuat sistem laporan online sehingga data dapat diperbarui terus oleh sekolah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya menunjukkan bahwa tahapan pelaksanaan kerjasama SMK dengan Dunia Usaha/Dunia Industri pada dasarnya terbagai menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu proses analisis kebutuhan, analisis partnership, perencanaan dan presentasi. Tahap kedua meliputi proses persetujuan, perundingan, dan penandatanganan MoU. Tahap ketiga meliputi proses pelaksanaan kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi.

b. Bentuk Pelaksanaan SMK dengan Dunia usaha/Dunia Industri

Bentuk pelaksanaan kerjasama SMK dengan Dunia Usaha/Dunia Industri menurut Yulianto dan Sutrisno (2014: 21) dapat berupa (1) Validasi Kurikulum. Hal ini dilakukan agar materi kegiatan pembelajaran yang tercakup dalam struktur kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Tujuannya sekolah dapat

menyiapkan perangkat kurikulum pada kompetensi keahlian yang dibuka untuk divalidasi industri, sekolah dapat menyerap masukan Dunia Usaha/Dunia Industri untuk diterapkan dalam bentuk kurikulum implementatif /kurikulum industri. (2) Kunjungan Industri (KI), dilakukan untuk memberikan wawasan mengenai dunia kerja yang akan dihadapi oleh siswa sebelum mengikuti program Prakerin. (3) Guru Tamu, bertujuan untuk menerapkan proses pembelajaran di sekolah sesuai kebutuhan industri dengan mendapat materi pembelajaran langsung dari Dunia Usaha/Dunia Industri.

Lebih lanjut Yulianto dan Sutrisno (2014: 22), efektivitas kerjasama tersebut dilakukan dalam bentuk (1) Praktek Kerja Industri (Prakerin), yang tujuannya: a) Siswa dapat menguasai kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang disyaratkan Dunia Usaha/Dunia Industri dan mendapatkan pengalaman teknis secara langsung di lini Produksi, b) Siswa dapat memiliki etos kerja yang sesuai dengan nilai – nilai yang ada di Dunia Usaha/Dunia Industri, c) Dunia Usaha/Dunia Industri dapat memberdayakan siswa untuk meningkatkan produktifitas yang bernilai ekonomis. (2) Uji Kompetensi Kejuruan (UKK), tujuannya untuk mengetahui kemampuan/kompetensi guru dan siswa sesuai standard kompetensi di Dunia Usaha/Dunia Industri. (3) On The Job Trainning (OJT) Guru, tujuannya guru dapat menambah kompetensi yang diperoleh di industri untuk diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. (4) Bantuan peralatan praktek dan beasiswa dari industry; Perusahaan umumnya memiliki program berupa pemberian sebagian keuntungannya untuk kepentingan sosial yang salah satunya untuk membantu dunia pendidikan, yang disebut program corporate

social responsibility (CSR). (5) Unit Produksi (UP), untuk menghasilkan tenaga – tenaga profesional yang mempunyai kemampuan teknis yang tinggi didukung oleh daya analitis yang memadai agar dapat melaksanakan proses produksi mengikuti kaidah – kaidah produktifitas, efisiensi dan kualitas yang tinggi. (6) Recruitment/Penempatan Tamatan, bursa kerja khusus (BKK) sekolah berkewajiban memfasilitasi/mempertemukan pencari kerja (tamatan/alumni) dengan user (perusahaan pencari tenaga kerja). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa bentuk pelaksanaan kerjasama antara SMK dengan Dunia Usaha/Dunia Industri antara lain: 1) Validasi Kurikulum. (2) Kunjungan Industri (KI), (3) Guru Tamu, bertujuan untuk menerapkan proses pembelajaran di sekolah sesuai kebutuhan industri dengan mendapat materi pembelajaran langsung dari Dunia Usaha/Dunia Industri.

c. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Kerjasama SMK dengan Dunia usaha/Dunia Industri

Faktor yang menentukan keunggulan/pelaksanaan kerjasama SMK dengan Dunia Usaha/Dunia Industri menurut Yulianto dan Sutrisno (2014: 20) antara lain: sumber daya manusia, pengaturan kebijakan sekolah dan sekolah itu sendiri. Pembinaan/pemberdayaan SDM, perlu diarahkan kepada profesionalisme kompetensi sesuai bidangnya dan menerapkan nilai-nilai iptek dalam mendukung kelancaran tugasnya. Pemberdayaan kebijakan sekolah diarahkan pada tersedianya perangkat sistem prosedur, aturan kerja, tumbuhnya kreativitas dan daya cipta (inovasi), serta konsistensi kebijakan yang menjamin rasa keadilan. pemberdayaan sekolah diarahkan kepada terbentuknya struktur dan kewenangan

sekolah yang bersifat luwes, fleksibel, kejelasan dalam pembagian tugas, ramping, serta memperbanyak tenaga-tenaga ahli fungsional.

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Arifin (2012:218) mengungkapkan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat melalui kerjasama kemitraan antara lain perbedaan budaya, *amteur status, investing in the partnership, economies of scale, dan funding issues*. Selanjutnya dalam peningkatan dampak kemitraan agar lebih baik dipengaruhi oleh faktor personal, adanya hambatan dari personal, faktor kekuasaan, faktor organisasional, hambatan dalam pengorganisasian, dan faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi kepuasaan dan peningkatan keefektifan komitmen serta keberhasilan aktivitas atau kegiatan. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan bersama adalah komitmen dan keterbukaan serta membangun kepercayaan bersama dalam kerangka kerjasama yang lebih panjang dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kerjasama SMK dengan Dunia Usaha/Dunia Industri antara lain: faktor SDM, pengaturan kebijakan sekolah, faktor kekuasaan, faktor organisasional, dan faktor perbedaan budaya.

B. Penelitian yang Relavan

Penelitian yang dilakukan oleh Candra Pratama (2016) yang meneliti tentang Pelaksanaan Kerjasama Antara SMK Kristen 5 Klaten dan PT Astra Honda Motor Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Di lakukan di SMK Kristen 5 Klaten pada bulan September 2017. Subjek dari penelitian ini terdiri dari kepala SMK Kristen 5 Klaten, Waka urusan Kurikulum, Waka urusan kesiswaan, Waka urusan sarana dan prasarana, Tenaga pengajar pengampu program studi Teknik Sepeda Motor, perwakilan dari pihak PT Astra Honda Motor Semarang, Peserta Didik yang terlibat dalam proses kerjasama SMK dengan PT Astra Honda Motor Semarang.

Hasil penelitian ini adalah (1) Perencanaan kerjasama antara SMK Kristen 5 Klaten dengan PT Astra Honda Motor Semarang sudah berjalan dengan baik dan memenuhi standar dimana terdapat beberapa program seperti Prarekin, pelatihan bagi siswa, meningkatkan sarana prasarana sekolah dan memfasilitasi guru untuk meningkatkan kompetensi. (2) Pelaksanaan kerjasama antara SMK Kristen 5 Klaten dan PT Astra Motor Semarang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan walaupun terdapat perbedaan antara yang tertera di MoU, dari 10 program yang direncanakan hanya delapan program yang dapat terealisasi. (3) Monitoring Kerjasama antara SMK Kristen 5 Klaten dan PT Astra Honda Motor Semarang yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mengetahui proses pelaksanaan kerjasama berjalan. (4) Evaluasi kerjasama antara SMK Kristen 5 Klaten dan PT Astra Honda Motor Semarang, Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan evaluasi ini tidak dilakukan dengan alasan kerjasama sudah berjalan dengan lancar dan tidak ada hal-hal yang perlu dievaluasi. (5) Pelaporan Kerjasama antara SMK Kristen 5 Klaten dan PT Astra Honda Motor Semarang untuk memberikan gambaran kepada berbagai pihak mengenai pekerjaan yang

dilakukan, dari hasil penelitian pelaporan sudah dilakukan setiap tiga bulan sekali.

(6) Faktor Pendukung Kerjasama antara SMK Kristen 5 Klaten dan PT Astra Honda Motor Semarang, Berdasarkan hasil keseluruhan wawancara dengan pihak sekolah maupun industri, bahwa yang menjadi faktor pendukung kerjasama antara lain: tenaga pengajar yang kompeten dalam bidangnya dan sarana prasarana sekolah yang sudah memadai. (7) Faktor penghambat Kerjasama antara SMK Kristen 5 Klaten dan PT Astra Honda Motor Semarang yang setelah diteili ternyata dinyatakan tidak ada. (8) Faktor penghambat Kerjasama antara SMK Kristen 5 Klaten dan PT Astra Honda Motor Semarang yang setelah diteliti tidak adanya upaya untuk mengatasi dikarenakan kedua belah pihak menganggap tidak adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan kerjasama.

Persamaan penelitian yang dibuat oleh Candra Pratama ini adalah sama-sama mengkaji tentang hubungan SMK dengan Dunia Industri perbedaannya terletak pada tujuan penelitiannya. Dalam penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan kerjasama SMK dengan Dunia Usaha/Dunia Industri dapat terwujud dengan baik. Perbedaan lainnya terletak pada subyek dan tempat penelitian.

C. Kerangka Pikir

Pentingnya penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan sumber daya pada Dunia Usaha/Dunia Industri dikarenakan adanya tujuan yang sama dalam meningkatkan kebutuhan ketenagakerjaan dimasa yang akan datang. Sekolah memiliki tujuan untuk membekali keterampilan dan penguasaan kompetensi yang

diperlukan oleh peserta didik sesuai kebutuhan pasar kerja, sedangkan Du/Di membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil sesuai dengan standarisasi industri. Karena apabila kualifikasi dan kompetensi lulusan pendidikan kejuruan gagal memenuhi kebutuhan dunia industri, maka dunia industri harus berinvestasi lebih mahal pada pelatihan dan pengembangan keahlian tenaga kerja yang dibutuhkan. Dengan adanya program *"link and match"* melalui kerjasama antara SMK dengan Du/Di diharapkan dapat meningkatkan kualitas lulusan SMK sesuai dengan standarisasi industri. Demikian pula SMK PIRI 1 Yogyakarta yang melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga Industri seperti PT. Yamaha, PT. Toyota, PT Tirta Jaya, PT. Indo Spaerpat Yogyakarta dll. Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas lulusan serta meningkatkan daya serap lulusan SMK PIRI 1 Yogyakarta yang dapat diterima di Du/Di.

Pada penelitian ini difokuskan kepada proses kerja sama yang telah dijalankan oleh SMK dengan Du/Di. Terdapat 3 tahap analisis yang akan dilakukan diantaranya: Tahap pertama yaitu proses analisis kebutuhan, analisis partnership, perencanaan dan presentasi. Tahap kedua meliputi proses persetujuan, perundingan, dan penandatanganan MoU. Tahap ketiga meliputi pelaporan, monitoring, evaluasi dan proses pelaksanaan kerjasama yang berupa pengembangan kurikulum, peningkatan SDM, sertifikasi dan peningkatan sarana prasarana pembelajaran.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang relevan di atas dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan kerjasama antara SMK PIRI 1 Yogyakarta dengan Du/Di?
2. Bagaimana pelaksanaan kerjasama antara SMK PIRI 1 Yogyakarta dengan Du/Di?
3. Bagaimana monitoring dari kedua belah pihak dalam pelaksanaan kerjasama antara SMK PIRI 1 Yogyakarta dengan Du/Di?
4. Apa sajakah faktor pendukung dalam pelaksanaan kerjasama antara SMK PIRI 1 Yogyakarta dengan Du/Di?
5. Apa sajakah faktor penghambat dalam pelaksanaan kerjasama antara SMK PIRI 1 Yogyakarta dengan Du/Di?
6. Bagaimana evaluasi serta keberlanjutan kerjasama antara SMK PIRI 1 Yogyakarta dengan Du/Di?
7. Kegiatan pembelajaran apakah yang telah dilaksanakan selama ini berhubungan dengan kegiatan pembelajaran siswa dengan melibatkan Du/Di?
8. Alternatif pengembangan kegiatan pembelajaran seperti apa yang direkomendasikan dalam program kerjasama SMK PIRI 1 Yogyakarta dengan Du/Di?